

POLICY BRIEF

“Sulsel Tangguh Bencana; dari Kapasitas Pemerintah hingga Aksi Masyarakat”

disusun oleh

Milawaty, S.S., M.M.
(Widyaiswara ahli muda
Pusjar SKMP)

ditujukan kepada:

24 Pemerintah Kab/Kota lingkup Prov
Sulsel, khususnya:

- Sekretaris Daerah
- Bappeda
- BPBD
- Dinas PU
- Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
- Kementerian Agama
- Dinas Kebudayaan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Komunikasi &
Informatika
- Dinas Perumahan &
Permukiman

Executive Summary

Dalam kurun 2001-2022, berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten masuk dalam 10 besar provinsi dengan jumlah bencana alam terbanyak di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat bahaya dan kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana namun belum diimbangi dengan optimalisasi kapasitas penanggulangan bencana. Ketidakseimbangan ini menyebabkan tingginya risiko bencana. Faktor alam, non alam, dan manusia menjadi penyebab terjadinya bencana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sikap tidak tanggap bencana dan aktivitas manusia yang tidak terkendali menjadi dua faktor pemicu meningkatnya risiko bencana alam. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko tersebut.

Rekomendasi penguatan kapasitas pemerintah dalam pencegahan bencana meliputi Satu OPD Satu Kawasan Siaga, ASN Siaga Bencana, Anggaran Responsif Risiko, Audit Risiko Rutin Infrastruktur, RT/RW Tanggap Risiko, Lomba Inovasi Siaga Bencana, dan Penguatan Pendidikan Kebencanaan berbasis Kearifan Lokal. Rekomendasi penguatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana meliputi Lomba Inovasi Siaga Bencana, Jurnalis Warga Siaga dan Kampanye Kebencanaan, Komunitas Tangguh Bencana, Sekolah Orang Tua Siaga, dan Festival Budaya Aman Bencana.

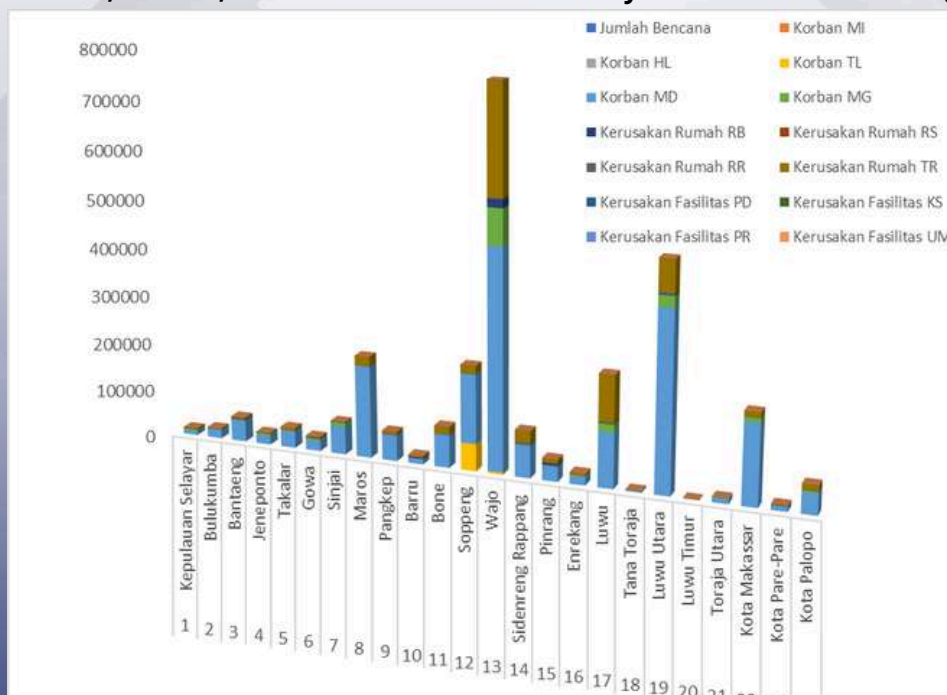
PENDAHULUAN

Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik karena terletak di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sangat rawan terhadap aktivitas tektonik, termasuk gempa bumi dan letusan gunung api akibat banyaknya sesar aktif di berbagai wilayah. Di samping potensi bencana geologi tersebut, Indonesia juga menghadapi risiko bencana hidrometeorologi. Ancaman tersebut meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta fenomena cuaca ekstrem seperti angin kencang, gelombang tinggi, dan abrasi pantai. Risiko bencana tersebut secara nyata tergambarkan dalam dokumen World Risk Report (WRR) 2023 (dalam www.tempo.co.id, April 2024) yang merilis negara paling berisiko bencana di dunia, di mana Indonesia menempati urutan kedua.

Salah satu daerah yang membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan kebencanaan adalah Sulawesi Selatan. Berdasarkan kondisi topografi Sulawesi Selatan, potensi bencana di wilayah ini adalah banjir dan genangan, banjir rob, longsor, erupsi gunung api, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana hidrometeorologi ekstrem, seperti angin puting beliung, badai lokal, hujan lebat, dan banjir bandang. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah banjir. Sedangkan jenis bencana dengan dampak terbesar adalah banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten masuk dalam 10 besar provinsi dengan jumlah bencana alam terbanyak. Dalam rentang waktu 2001 hingga 2022, provinsi ini hampir selalu tercatat, kecuali pada tahun 2002, 2005, 2012, dan 2013. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, Sulawesi Selatan bahkan selalu masuk dalam peringkat 10 besar, dengan posisi berkisar antara peringkat ke-4 hingga ke-9. DIBI juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 25 tahun, dari tahun 2000 hingga 2024, telah terjadi 1.928 kejadian bencana di wilayah ini. Jumlah korban, baik yang meninggal dunia, hilang, terluka, maupun terdampak, mencapai 2.008.700 jiwa. Selain itu, terdapat kerusakan terhadap 2.083 fasilitas pelayanan publik, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan fasilitas umum lainnya.

Gambar 1.
Statistik Bencana, Korban, dan Kerusakan menurut Wilayah di Sulawesi Selatan (2001-2024)



Keterangan:

MI = meninggal; HL = hilang; TL = terluka; MD = menderita; MG = mengungsi; RB = rusak berat; RS = rusak sedang; RR = rusak ringan; TR = terendam; PD = pendidikan; KS = kesehatan; PR = peribadatan; UM = umum

(Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia, <https://dibi.bnppb.go.id>)

DESKRIPSI MASALAH

Fakta menunjukkan bahwa selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu keluar dari kategori provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak di Indonesia. Provinsi ini terdiri atas 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota yang tersebar di berbagai kondisi geografis dan topografis yang beragam. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2026, telah diidentifikasi sejumlah daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Adapun jenis bencana dan sebaran wilayahnya dapat dilihat pada gambar disamping.

Gambar 2.
Jumlah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang Berisiko Tinggi terhadap Bencana Alam



(Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2026, Data Diolah)

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat bahaya dan kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Namun demikian, kapasitas penanggulangan bencana di berbagai daerah di provinsi ini masih tergolong belum optimal. Ketidakseimbangan antara tingginya tingkat bahaya dan kerentanan dengan kapasitas yang tersedia menyebabkan tingkat risiko bencana di wilayah ini tetap tinggi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (dalam <https://walhisulsel.or.id>, Februari 2025) bahkan mencatat provinsi ini sudah mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Hal ini terlihat dalam 10 tahun terakhir setidaknya angka kejadian bencana di Sulawesi Selatan meningkat 6 kali lipat.

Data di atas mengindikasikan bahwa permasalahan ini bersifat sangat mendesak dan memerlukan tindak lanjut segera. Apabila tidak direspons dengan tepat, hal ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap aspek keamanan dan keselamatan bagi 9,463 juta jiwa penduduk Sulawesi Selatan (Sumber : Data Juni 2024 pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri). Selain itu, implikasi lanjutan yang dapat timbul mencakup kerusakan infrastruktur, gangguan terhadap aktivitas ekonomi, serta dampak sosial yang meluas. Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2026 memaparkan potensi kerugian ekonomi akibat bencana banjir di tahun 2021 sebesar Rp23.533.592 triliun, banjir bandang Rp 3.967.154 triliun, cuaca ekstrim Rp 48.920.709 triliun, gelombang ekstrim dan abrasi Rp 64,577 miliar, dan tanah longsor Rp11.187.616 triliun. Potensi kerugian tersebut belum termasuk bencana alam lainnya, seperti gempa bumi, kekeringan, dan sebagainya.

DESKRIPSI MASALAH

(lanjutan..)



Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah merumuskan tiga penyebab terjadinya bencana, yaitu faktor alam, non alam, maupun oleh faktor manusia. Di tinjau dari faktor manusia, beberapa penyebab mengapa penanganan kebencanaan kabupaten kota di Sulawesi Selatan belum mampu mengeluarkan daerah ini dalam zona bahaya ini adalah sebagai berikut: pertama, penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah- langkah yang sistematis dan terencana, sehingga masih dijumpai tumpang tindih program dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Selatan (Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2026). Kedua, kapasitas pemerintah dan masyarakat masih rendah sementara tingkat bahaya dan kerentanan terhadap multibahaya tergolong tinggi (Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2026). Ditinjau dari kapasitas kabupaten kota di Sulawesi Selatan, kapasitas seluruh kabupaten kota (kecuali Bone) masih dalam kategori rendah. Tingginya tingkat kerentanan turut memperbesar potensi terjadinya bencana. Hal ini selaras dengan penelitian Dwiyantri (2018) dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan bencana di wilayah Sulawesi Selatan adalah sikap tidak tanggap bencana dari masyarakat setempat yang disebabkan oleh bencana yang terjadi masih dalam skala kecil sehingga tidak dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan kepala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan (dalam Padolo, 2024) bahwa masyarakat belum terlibat secara optimal, serta masih kurangnya perhatian pemerintah dalam meningkatkan mitigasi bencana. Ketiga, aktivitas manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana alam.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-204 secara tertulis telah memperingatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk, pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak terkendali, praktik pembalakan liar, serta urbanisasi yang tidak direncanakan dengan baik, berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana yang lebih parah. Ketidaksesuaian penataan ruang dengan prinsip pengurangan risiko serta pembangunan infrastruktur di wilayah rawan bencana berpotensi menciptakan risiko baru. Bencana tidak hanya memperlambat, tetapi juga dapat merusak capaian pembangunan yang telah diraih.

Jika tidak dikelola dengan baik, sikap tidak tanggap bencana dan aktivitas manusia dapat memperparah risiko bencana alam. Untuk mengatasi hal tersebut, penguatan kapasitas diperlukan agar dampaknya dapat ditekan seminimal mungkin. Kapasitas dalam UU kebencanaan didefinisikan sebagai penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Dalam hal ini rekomendasi yang akan diberikan dalam tulisan ini adalah tersedianya alternatif rekomendasi terkait penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam meminimalkan dampak bencana.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1 Penguatan Kapasitas Pemerintah dalam Meminimalkan Dampak Bencana, antara lain:

- Program “Satu Perangkat Daerah Satu Kawasan Siaga (PD SIAGA)”. Pada program ini setiap perangkat daerah teknis mengampu satu wilayah rawan untuk pembinaan kesiapsiagaan. Tujuannya adalah mendorong OPD turut serta dalam pembinaan kesiapsiagaan. Penanggung jawab kegiatan ini berada di Sekretariat Daerah. Perangkat daerah pengampu kawasan siaga akan melakukan pelatihan dan edukasi, serta pemberian infrastruktur yang masuk dalam kewenangan perangkat daerah dan membangun sinergi lintas sektor dalam pendekatan kawasan.
- ASN Siaga Bencana. Program ini bertujuan untuk menjadikan ASN sebagai agen perubahan dan pelopor kesiapsiagaan melalui pelatihan rutin ASN, simulasi evaluasi, dan integrasi ke SKP ASN. Dengan demikian ASN akan lebih siap dan sigap saat terjadi bencana dan diharapkan mampu menjadi tenaga penolong tambahan saat terjadinya bencana. Penanggung jawab kegiatan ini adalah BPBD dengan pelaksana berasal dari BKPSDM.
- Anggaran Responsif Risiko. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebencanaan ke dalam proses penganggaran tahunan dengan penanggung jawab Bappeda dan pelaksana TAPD. Melalui program ini diharapkan tersedia kebijakan anggaran yang berukur berbasis risiko dan nomenklatur kebencanaan meningkat.
- Audit Risiko Rutin Infrastruktur. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan agar infrastruktur yang penganggarnya berasal dari nomenklatur kebencanaan tahan terhadap risiko bencana. Tanggung jawab program ini dari BPBD dengan pelaksana Dinas PU. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti audit bangunan publik, pemetaan potensi bahaya, dan perbaikan desain teknis.
- RT-RW Tanggap Risiko. Program ini bertujuan untuk mendorong integrasi kebencanaan dalam tata ruang permukiman melalui revisi dan pendampingan rencana tata ruang permukiman tingkat RT/RW berbasis risiko. Program ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman.
- Lomba Inovasi Siaga Bencana. Program ini bertujuan mendorong lahirnya inovasi yang meminimalkan dampak kebencanaan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Program ini dapat diinisiasi oleh BPBD, serta dilaksanakan oleh perangkat daerah dan masyarakat. Program ini mencakup merancang tema inovasi, melaksanakan lomba, dan menetapkan pemenang inovasi.
- Penguatan pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal. Program ini bertujuan mengangkat dan menggaungkan kembali kearifan lokal kebencanaan melalui identifikasi kearifan lokal, dokumentasi dan digitalisasi (inventarisasi, video, platform digital lokal), pembelajaran partisipatif, dan penetapan perda tentang perlindungan pengetahuan lokal dan kebencanaan. Program ini dapat diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan.

2 Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Meminimalkan Dampak Bencana, antara lain:

- Penambahan fungsi rumah ibadah sebagai pusat edukasi dan evakuasi. Pelaksana dalam kegiatan ini adalah pengurus rumah ibadah dan komunitas keagamaan dengan penanggung jawab adalah kementerian agama di daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pengurus rumah ibadah dan komunitas keagamaan melakukan edukasi rutin pascaibadah tentang kesiapsiagaan, menyediakan perlengkapan P3K dan logistik dasar, serta melaksanakan simulasi bencana berbasis komunitas iman.
- Jurnalisme Warga Siaga dan Kampanye Kebencanaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah cara pandang publik terhadap bencana, dan mendorong warga sebagai penyampai informasi kebencanaan. Program ini dilakukan melalui pemanfaatan media lokal, influencer, warga dan komunitas literasi. Penanggung jawabnya adalah Diskominfo. Lingkup kerjanya adalah melalui pelatihan menulis, podcast, vlog mitigasi, konten lokal, produksi konten, pelatihan jurnalis warga, dan lomba konten sadar bencana.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

(lanjutan..)

- Komunitas Tangguh Bencana. Program ini bertujuan untuk membangun komunitas yang saling menopang saat bencana melalui penguatan jaringan sosial, dan pelatihan keterampilan darurat. Program ini dilakukan oleh karang taruna, LPM, PKK, dan tokoh masyarakat, dengan penanggung jawab kepala desa/kelurahan.
- Sekolah Orang Tua Siaga. Program ini bertujuan untuk memberdayakan orang tua dalam edukasi risiko keluarga melalui workshop, diskusi, simulasi evaluasi keluarga di rumah. Program ini dilakukan oleh pengurus sekolah dengan penanggung jawab kepala sekolah.
- Festival Budaya Aman Bencana. Program ini bertujuan untuk mengubah narasi bencana jadi bagian dari budaya lokal melalui pentas seni, lomba tradisi, ritual adaptif (menggabungkan unsur pengetahuan kebencanaan ke dalam ritual atau kegiatan budaya yang biasa dilakukan masyarakat). Program ini dilakukan oleh sanggar seni dan pelajar melalui Dinas Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Informasi Bencana Indonesia. (Online), (<https://dibi.bnrb.go.id>, diakses pada 9 Mei 2025)
- Dwiyanti, Andi Amytia Resty. 2018. Dinamika Diplomasi Bencana melalui Pendekatan Paradiplomasi oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Jurnal Dauliyah, Vol. 3, No. 1, January 2018. (Online), (www.garuda.kemdikbud.go.id; diakses pada 14 Mei 2025)
- Kedeputan Bidang Sistem dan Strategi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana. 2021. Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2026.
- Padolo, Amson. 2024. Respon Cepat Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Provinsi Sulsel. Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Tahun 2024 Puslatbang KMP Lembaga Administrasi Negara
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-204
- Tempo Online. 6 April 2024. Indonesia Urutan Kedua: Inilah Daftar 10 Negara Paling Berisiko Bencana di Dunia Versi World Risk Report (WRR) 2023. (Online), (www.tempo.co, diakses pada 9 Mei 2025)
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel. Februari 2025. Bencana Terus Berulang, WALHI Sulawesi Selatan Beberkan Penyebabnya. (Online), (<https://walhisulsel.or.id>, diakses tanggal 16 Mei 2025)